



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA



RENCANA KINERJA TAHUNAN

2026



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Nomor : 183/KPN.W4-U5/SK.RA1.9/II/2025

**TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2026;
2. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tingkat pertama; dan
3. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; dan
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2026.
- Pertama : Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk tahun 2026.
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2026 memuat rencana target kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama sesuai Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang akan dicapai pada tahun 2026 sesuai Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA 2025-2029.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 10 Februari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



EFENDI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95% 5% 95% 97% 30% 90%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	100% 4%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	- - 95%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	40%

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

